

BAB II

PROFIL DAN PRODUK WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) JAWA TENGAH

2.1 Profil WALHI Jawa Tengah

WALHI Jawa Tengah merupakan bagian dari jaringan WALHI Indonesia, yang dikenal sebagai organisasi lingkungan hidup non-pemerintah terbesar di Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade, WALHI Jawa Tengah konsisten menjalankan misinya untuk melindungi, memulihkan, dan menjaga kelestarian lingkungan, terutama di wilayah Jawa Tengah. Selain itu, organisasi ini juga aktif membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan, serta mendorong peran aktif warga dan pemerintah, baik di desa maupun kota. Secara umum, WALHI Jateng memiliki cita-cita untuk menciptakan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang berkeadilan dan demokratis, di mana hak rakyat atas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dapat benar-benar diwujudkan.

Gambar 2. 1 Logo WALHI Jawa Tengah



Sumber: WALHI Jawa Tengah

WALHI Jawa Tengah mengambil sikap kritis terhadap dominasi kapitalisme global serta dampak dari kebijakan pasar bebas yang seringkali mengabaikan

keberlangsungan lingkungan hidup, terutama di tengah maraknya eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian alam (WALHI Jawa Tengah, n.d.). Ketimpangan ini berisiko menimbulkan kerusakan ekosistem, krisis lingkungan, serta ketidakadilan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada alam. Oleh sebab itu, WALHI Jawa Tengah mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang mengedepankan perlindungan lingkungan, sekaligus memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tujuan besarnya adalah memastikan bahwa semua orang, khususnya di Jawa Tengah, dapat menikmati akses yang adil terhadap lingkungan yang aman dan lestari.

Dalam menjalankan misinya, WALHI Jawa Tengah selalu mengutamakan prinsip keadilan sosial, ekonomi, dan ekologi. Dengan visi menciptakan sistem kehidupan yang lebih adil dan setara, WALHI Jateng terus memperjuangkan pemenuhan hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, mereka aktif mengembangkan pendekatan berbasis komunitas yang bertujuan untuk mengajak masyarakat lokal turut terlibat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pendekatan ini dianggap penting untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan untuk menghasilkan solusi jangka panjang yang bermanfaat bagi generasi masa depan (WALHI Jawa Tengah, n.d.).

2.2 Produk dan Layanan WALHI Jawa Tengah

WALHI Jawa Tengah adalah organisasi independen dan nirlaba yang berfokus pada perlindungan lingkungan serta memperjuangkan keadilan ekologi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai bagian dari jaringan nasional WALHI, organisasi ini menjalankan perannya untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, dan memperkuat gerakan lingkungan berbasis komunitas. Kegiatan serta layanan yang ditawarkan oleh WALHI Jawa Tengah tidak bersifat komersial, melainkan

merupakan bentuk kepedulian publik (*public goods*) yang bertujuan menciptakan perubahan struktural dalam tata kelola sumber daya alam.

Salah satu layanan utama yang dikembangkan adalah advokasi kebijakan dan hukum di bidang lingkungan. WALHI Jawa Tengah secara aktif memantau kebijakan pemerintah daerah maupun nasional yang dinilai berpengaruh terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Melalui strategi advokasi yang terarah, WALHI mendorong lahirnya regulasi yang mendukung pelestarian alam serta melindungi hak-hak masyarakat. Mereka juga turut hadir dalam berbagai forum-forum legislatif dan eksekutif, serta penggunaan jalur litigasi maupun non-litigasi untuk memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat.

Contoh nyata dari upaya advokasi tersebut dapat dilihat dalam pendampingan terhadap warga Jatirejo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Warga di wilayah ini terdampak oleh keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Pada tanggal 28 Oktober 2024, perwakilan masyarakat mengikuti forum diskusi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surakarta dan PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) sebagai tindak lanjut dari keluhan warga mengenai dampak lingkungan dari proyek tersebut (WALHI Jawa Tengah, 2024).

Gambar 2. 2 Proses Advokasi WALHI Jawa Tengah dan Warga Jatirejo



Sumber: WALHI Jawa Tengah

Pertemuan ini diikuti oleh sejumlah pihak, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surakarta, Dinas Lingkungan Hidup, UPT TPA, Camat Jebres, pengelola PLTSa, serta perwakilan masyarakat yang terdampak. Hasil pertemuan ini mengungkapkan bahwa walaupun ada beberapa kesepakatan teknis, seperti pemasangan paranet untuk menahan debu, sebagian besar aspirasi warga belum mencapai kesepakatan. WALHI Jawa Tengah kemudian turut mendampingi warga dalam mengawal jalannya proses ini, guna memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan mendorong pertanggungjawaban dari pihak korporasi maupun negara atas dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Layanan kedua yang disediakan oleh WALHI Jawa Tengah adalah pendampingan terhadap komunitas yang terdampak konflik lingkungan. Salah satu kekuatan utama organisasi ini terletak pada upayanya dalam mendampingi kelompok masyarakat yang menjadi korban akibat proyek-proyek infrastruktur besar, perluasan industri ekstraktif, maupun pencemaran lingkungan. Bentuk pendampingan tersebut meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan organisasi lokal, serta dukungan dalam kegiatan advokasi dan pemulihan hak atas lingkungan yang layak.

Salah satu contohnya adalah pendampingan WALHI Jawa Tengah terhadap warga Desa Penawangan di Kabupaten Semarang yang menolak rencana pertambangan oleh PT Joglosemar Purnama Jaya di atas lahan pertanian milik warga. Pada 21 Juni 2024, warga menyampaikan penolakan mereka kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Mereka menegaskan bahwa lahan yang akan ditambang merupakan bagian dari Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (WALHI Jawa Tengah, 2023). Kedua lembaga tersebut menanggapi laporan warga secara positif dan menyatakan akan meninjau kembali proses perizinan. Pendampingan semacam ini mencerminkan dedikasi WALHI Jawa Tengah dalam membela hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan lestari.

Gambar 2. 3 Proses Pendampingan WALHI Jawa Tengah dan Warga Desa Penawangan



Sumber: WALHI Jawa Tengah

Produk atau layanan ketiga yang disediakan oleh WALHI Jawa Tengah adalah pelaksanaan kajian dan riset ekologis. Organisasi ini secara konsisten menghasilkan studi mendalam yang berfungsi sebagai landasan dalam kegiatan advokasi serta sebagai sarana edukasi publik. Fokus kajiannya meliputi analisis terhadap dampak lingkungan dari suatu proyek, pemetaan konflik ekologi, serta kajian sosial-ekologis berbasis data empiris. Hasil riset ini menjadi materi kampanye serta referensi bagi pembuat kebijakan dan kalangan akademisi.

Salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah penelitian mengenai pencemaran logam berat di wilayah perairan Teluk Semarang. Dalam kerja kolaboratif bersama Yayasan Amerta Air Indonesia (YAAI), WALHI Jawa Tengah menerapkan pendekatan ekologi politik kualitas air guna mengungkap kerumitan masalah pencemaran dan dampaknya terhadap nelayan budidaya kerang. Kajian ini disusun melalui telaah terhadap 21 artikel ilmiah, studi arsip, serta hasil kerja lapangan di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Sungai Banjir Kanal Timur, dan Kawasan Industri Terboyo. Hasil penelitian mengidentifikasi keberadaan lima jenis logam berat berbahaya, yakni timbal (Pb), tembaga (Cu), seng (Zn), besi (Fe), dan kadmium (Cd), yang mencemari kawasan perairan dan menimbulkan potensi risiko terhadap kesehatan manusia serta ekosistem pesisir.

Penemuan tersebut tidak hanya memperkuat tuntutan untuk menghentikan pembuangan limbah industri ke laut, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya mempertahankan praktik budidaya kerang yang berkelanjutan secara ekologis dan inklusif secara sosial. Kajian ini turut merumuskan dua pendekatan strategis berdasarkan ulasan dari berbagai penelitian sebelumnya. Pertama, pengurangan konsumsi kerang dari wilayah yang telah terkontaminasi logam berat, meskipun hal ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan nelayan yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan lingkungan. Kedua, pendekatan struktural melalui pengurangan sumber pencemaran logam berat di bagian hulu Teluk Semarang, yang dinilai lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan ekologis antara aktivitas industri dan keberlangsungan hidup komunitas nelayan. Rekomendasi tambahan dari penelitian ini mencakup penyusunan model konseptual pencemaran logam berat, serta perlunya riset lanjutan mengenai pengaruhnya terhadap kesehatan manusia dan dinamika perubahan iklim (WALHI Jawa Tengah, 2025).

Dengan menghasilkan riset-riset semacam ini, WALHI Jawa Tengah menegaskan perannya dalam membangun fondasi pengetahuan yang kokoh guna memperjuangkan keadilan ekologis serta melindungi kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh krisis lingkungan.

Gambar 2. 4 Kajian dan Riset Ekologis WALHI terkait Pencemaran Logam Berat



Sumber: Dokumen Pribadi

Produk atau layanan keempat yang dijalankan oleh WALHI Jawa Tengah adalah kampanye publik dan kegiatan edukasi lingkungan. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi advokasi yang bertujuan mendorong perubahan sosial melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup. Ragam kegiatan dalam kampanye ini meliputi publikasi melalui media massa, diskusi publik, pelatihan, serta integrasi seni dan budaya sebagai sarana penyampaian pesan-pesan ekologis. Upaya edukatif dilakukan secara inklusif, dengan menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga petani dan nelayan.

Gambar 2. 5 Kampanye Publik oleh WALHI Jawa Tengah dalam Sedekah Laut

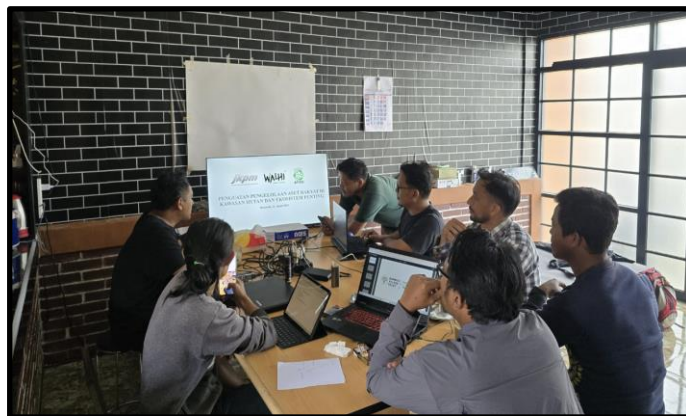


Sumber: WALHI Jawa Tengah

Salah satu bentuk nyata dari kegiatan ini adalah keterlibatan WALHI Jawa Tengah dalam acara tradisional Sedekah Laut yang digelar bersama nelayan di Dukuh Roban Timur, Kabupaten Batang, pada 21 Juli 2024 (WALHI Jawa Tengah, 2024). Acara tersebut dimanfaatkan sebagai ajang kampanye penyelamatan wilayah pesisir yang menghadapi ancaman abrasi akibat perubahan pola arus laut yang dipicu oleh pembangunan PLTU. Dalam kegiatan ini, warga bersama WALHI menyuarakan kondisi krisis lingkungan di kawasan tersebut melalui berbagai aktivitas edukatif yang menekankan pentingnya perlindungan ruang hidup, kelestarian ekosistem pesisir, serta keterkaitannya dengan ketahanan pangan dan hak-hak nelayan.

Produk atau layanan terakhir yang menjadi bagian integral dari kerja WALHI Jawa Tengah adalah penguatan jaringan dan koalisi gerakan masyarakat. Organisasi ini berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai elemen, termasuk komunitas lokal, organisasi rakyat, akademisi, serta kelompok pemuda yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan. Melalui pembangunan jejaring ini, WALHI mendorong terbentuknya kerja sama strategis dalam memperjuangkan keadilan ekologis serta memperluas cakupan pengaruh gerakan lingkungan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Gambar 2. 6 Kolaborasi WALHI Jawa Tengah dengan JKPM dan AP2SI



Sumber: WALHI Jawa Tengah

Sebagai contoh, WALHI Jawa Tengah menjalin kemitraan dengan Jaringan Kerja Pendampingan Masyarakat (JKPM) Wonosobo dan AP2SI dalam sebuah pertemuan koordinasi yang dilaksanakan di Wonosobo pada 13 Januari 2025 (WALHI Jawa Tengah, 2025). Forum ini bertujuan memperkuat peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya yang termasuk dalam wilayah ekosistem esensial seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto dan Serayu. Fokus kegiatan meliputi integrasi perlindungan lingkungan dengan penguatan ekonomi lokal melalui pendekatan agroforestri dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Berlandaskan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekosistem, WALHI Jawa Tengah terus berupaya menjadi bagian dari solusi terhadap krisis lingkungan yang dihadapi masyarakat. Seluruh program dan layanannya ditujukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan layak, sekaligus menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan demi keberlangsungan generasi yang akan datang.

2.3 Stakeholder Internal dan Eksternal WALHI Jawa Tengah

2.3.1 Stakeholder Internal

Struktur internal WALHI di wilayah Jawa Tengah dibentuk berdasarkan ketentuan yang diatur dalam statuta organisasi. Susunan kelembagaan ini terdiri atas empat komponen utama yang memiliki peran strategis dalam menjalankan roda organisasi, yakni: Keanggotaan, Dewan Daerah, Eksekutif Daerah, serta organ nasional yang mencakup Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional. Masing-masing organ memiliki mandat yang berbeda namun saling melengkapi, dengan tujuan menjamin proses pengambilan keputusan yang demokratis, keterwakilan gender yang inklusif, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

2.3.1.1 Anggota Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah

Anggota WALHI terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu organisasi non-pemerintah dan individu. Keduanya harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Statuta WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapat (hak bicara) serta berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan (hak suara) di seluruh forum resmi organisasi. Sebaliknya, mereka juga berkewajiban untuk mematuhi statuta dan seluruh keputusan organisasi yang telah disepakati secara kolektif. Adapun persyaratan utama untuk menjadi anggota WALHI adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki hubungan atau afiliasi langsung dengan partai politik, perusahaan/bisnis, maupun institusi negara seperti TNI dan Polri.
- b. Memiliki pengalaman nyata dalam kerja advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia dengan durasi minimal tiga tahun untuk organisasi dan empat tahun untuk individu.
- c. Bagi organisasi, harus menunjukkan struktur kepengurusan yang jelas serta program kerja yang terencana sebagai bukti kapabilitas kelembagaan.
- d. Mendapat dukungan atau rekomendasi dari minimal tiga anggota aktif WALHI, sebagai bentuk kontrol internal terhadap proses keanggotaan.
- e. Menyampaikan surat pernyataan yang menunjukkan komitmen untuk mematuhi statuta serta seluruh ketentuan organisasi.

Lembaga anggota WALHI Jawa Tengah saat ini terdiri dari Yayasan Abdi Umat, Pelita Bangsa, Mitapahsa (KPA-UIN Salatiga), Selendang Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang,

Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial (LKTS), Suphel Karanganyar, dan LMIH Karanganyar.

2.3.1.2 Dewan Daerah

Dewan Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur internal WALHI yang berperan sebagai wakil resmi anggota di tingkat wilayah. Pembentukan Dewan ini dilakukan secara demokratis melalui forum tertinggi daerah, yaitu Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH), di mana seluruh anggota memiliki hak untuk memilih dan mengesahkan perwakilan mereka secara langsung. Dewan Daerah memiliki mandat strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan, merumuskan kebijakan organisasi di tingkat wilayah, serta memastikan keberlanjutan nilai-nilai perjuangan WALHI di tingkat lokal.

Struktur Dewan Daerah terdiri dari sedikitnya tiga orang dan paling banyak lima orang anggota, dengan satu di antaranya menjabat sebagai ketua (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Proses pemilihannya mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan pengalaman calon, serta menekankan prinsip keadilan dan keterwakilan gender. Pendekatan ini sejalan dengan visi WALHI untuk menciptakan ruang organisasi yang adil, setara, dan menjunjung tinggi keberagaman identitas.

Setiap anggota Dewan Daerah menjabat selama empat tahun dalam satu periode (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Seseorang diperbolehkan mencalonkan diri kembali dan menjabat untuk satu periode tambahan, namun tidak diperkenankan menjabat lebih dari dua periode secara berurutan. Aturan ini bertujuan untuk mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin baru dalam organisasi, menjaga dinamika internal tetap sehat, serta memastikan bahwa arah gerakan

WALHI di tingkat daerah tetap adaptif terhadap tantangan lingkungan yang terus berkembang.

2.3.1.3 Eksekutif Daerah

Eksekutif Daerah merupakan salah satu elemen kunci dalam struktur internal WALHI yang memiliki tanggung jawab utama atas pelaksanaan kebijakan, program, serta pengelolaan anggaran organisasi di tingkat wilayah. Peran ini dijalankan berdasarkan keputusan yang telah disepakati dalam forum tertinggi wilayah, yakni Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH). Sebagai organ pelaksana, Eksekutif Daerah memiliki fungsi strategis untuk menerjemahkan mandat organisasi yang diperoleh secara demokratis menjadi langkah-langkah kerja yang konkret, terukur, dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar WALHI.

Kepemimpinan struktur ini berada di tangan Direktur Eksekutif Daerah, yang dipilih secara langsung oleh anggota dalam forum PDLH atau, dalam situasi tertentu, melalui forum Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup Luar Biasa (PDLH-LB). Proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota, mencerminkan nilai-nilai demokrasi internal dan komitmen terhadap transparansi serta pertanggungjawaban kepada basis organisasi. Direktur Eksekutif bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program advokasi, pemberdayaan komunitas, kampanye publik, serta mengelola sumber daya organisasi secara profesional dan bertanggung jawab.

Jabatan Direktur Eksekutif Daerah berlaku selama empat tahun untuk satu masa kepemimpinan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Untuk menjamin adanya regenerasi serta menjaga dinamika organisasi, seseorang hanya diperbolehkan menjabat

kembali untuk satu periode tambahan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mendorong lahirnya pemimpin baru yang memiliki visi segar, serta menghindari penumpukan kekuasaan yang dapat merugikan prinsip kolektif dalam organisasi.

2.3.1.4 Eksekutif Nasional

Eksekutif Nasional merupakan salah satu organ inti dalam struktur internal WALHI yang berperan sebagai pelaksana utama di tingkat nasional. Tugas utamanya mencakup pelaksanaan kebijakan strategis, arah gerakan politik organisasi, perencanaan program kerja, serta pengelolaan sumber daya keuangan secara terpadu. Seluruh tanggung jawab ini dilaksanakan berdasarkan keputusan-keputusan resmi yang dihasilkan melalui forum tertinggi organisasi di tingkat nasional, yakni Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) dan/atau Kongres Nasional Lingkungan Hidup (KNLH). Keberadaan Eksekutif Nasional menjadi penghubung penting dalam menjaga kesinambungan arah gerakan lingkungan hidup dari tingkat lokal ke nasional, sekaligus memperluas jejaring advokasi hingga ke kancah internasional (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021).

Pimpinan dari struktur ini adalah Direktur Eksekutif Nasional, yang dipilih melalui mekanisme demokratis oleh delegasi anggota dalam forum PDLH, atau melalui Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup Luar Biasa (PDLH-LB) apabila diperlukan. Proses pemilihan ini mencerminkan komitmen organisasi terhadap nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif anggota dalam menentukan arah kelembagaan. Direktur Eksekutif Nasional mengemban tugas untuk memimpin pelaksanaan strategi organisasi secara nasional, yang meliputi pengembangan kebijakan publik, pelaksanaan kampanye berskala nasional, kerja sama lintas sektor dengan pemangku

kepentingan, serta memperkuat kapasitas organisasi di seluruh daerah (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021).

Masa kepemimpinan Direktur Eksekutif Nasional ditetapkan selama empat tahun untuk satu periode jabatan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Untuk mendorong regenerasi kepemimpinan dan menyegarkan dinamika organisasi, seorang Direktur hanya dapat menjabat kembali untuk satu periode tambahan, dengan tujuan menjaga sirkulasi gagasan serta menghindari dominasi kekuasaan dalam satu figur kepemimpinan.

2.3.1.5 Dewan Nasional

Dewan Nasional merupakan organ internal WALHI yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional, serta berperan sebagai representasi kolektif dari seluruh basis keanggotaan organisasi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Anggota dari Dewan ini dipilih melalui mekanisme demokratis yang berlangsung dalam forum tertinggi organisasi, yakni Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH). Proses ini menegaskan komitmen organisasi terhadap prinsip partisipasi aktif dan perwakilan yang setara dalam menentukan arah dan pengawasan strategis gerakan lingkungan secara nasional.

Setiap individu yang terpilih menjadi anggota Dewan Nasional telah melalui tahapan pendidikan kepemimpinan yang difasilitasi oleh WALHI. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas calon pemimpin dengan pembekalan mengenai nilai-nilai dasar gerakan lingkungan hidup, hak asasi manusia, keadilan sosial, serta tata kelola organisasi yang demokratis (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Pendidikan ini menjadi syarat utama guna memastikan bahwa

para anggota Dewan memiliki kompetensi analitis, kepemimpinan beretika, serta integritas dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Komposisi Dewan Nasional melibatkan antara lima hingga tujuh orang anggota, dengan proses pemilihan yang dirancang inklusif dan mempertimbangkan representasi dari beragam identitas gender (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan yang dijunjung tinggi WALHI dalam struktur kepemimpinannya, serta mencerminkan upaya untuk menciptakan ruang yang adil dan setara dalam pengambilan keputusan.

Masing-masing anggota Dewan Nasional mengemban masa tugas selama empat tahun dalam satu periode jabatan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021). Untuk menjamin terjadinya sirkulasi kepemimpinan dan penyegaran ide di dalam tubuh organisasi, seorang anggota hanya diperkenankan untuk menjabat kembali satu periode tambahan setelah masa jabatan pertamanya berakhir.

2.3.2 Stakeholder Eksternal

WALHI Jawa Tengah beroperasi dalam ekosistem gerakan sosial yang luas, melibatkan beragam pihak eksternal sebagai pemangku kepentingan utama dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemajuan hak-hak masyarakat. Para pemangku kepentingan ini memainkan berbagai peran strategis, mulai dari mitra kolaboratif, sasaran advokasi, hingga penerima manfaat langsung. Keterlibatan mereka secara aktif mendukung tercapainya visi WALHI Jawa Tengah untuk mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup. Adapun kelompok-kelompok eksternal yang menjadi mitra utama organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.2.1 Masyarakat atau Komunitas Lokal

Kelompok masyarakat dan komunitas lokal menempati posisi sentral dalam kerja-kerja WALHI Jawa Tengah. Mereka adalah pihak yang paling rentan terhadap dampak krisis ekologis, termasuk konflik lahan, pencemaran lingkungan, dan bencana ekologis yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan berskala besar. Sebagai contoh, masyarakat petani di Jepara, khususnya warga Dukuh Toplek, menghadapi ancaman serius dari alih fungsi lahan dan pencemaran yang berasal dari aktivitas industri (WALHI Jawa Tengah, 2025). WALHI Jawa Tengah memberikan pendampingan melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelatihan advokasi, serta dukungan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang layak dan ruang hidup yang lestari. Pendekatan ini juga mencakup fasilitasi penyelesaian konflik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan.

2.3.2.2 Organisasi Masyarakat Sipil dan Jaringan Gerakan Sosial

WALHI Jawa Tengah aktif membangun jaringan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti serikat petani, organisasi kepemudaan, kelompok perempuan, dan aliansi advokasi lintas isu. Kolaborasi ini memungkinkan terbangunnya solidaritas sosial yang lebih luas, memperkuat posisi tawar gerakan masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan, serta memperbesar dampak kampanye lingkungan dalam ruang publik. Salah satu mitra strategis WALHI Jawa Tengah adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Jawa Tengah. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengarusutamakan perspektif perempuan dalam isu lingkungan dan agraria, serta mendorong pelibatan perempuan dalam advokasi kebijakan dan kampanye lingkungan, khususnya di kawasan pedesaan yang rentan.

2.3.2.3 Media Massa dan Jurnalis Independen

Media juga merupakan stakeholder penting dalam ekosistem kerja WALHI Jawa Tengah, terutama dalam aspek penyebaran informasi, edukasi publik, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Organisasi ini menjalin hubungan erat dengan jurnalis dan media independen guna memastikan bahwa isu-isu lingkungan mendapat perhatian luas dan masuk dalam agenda wacana publik. Salah satu inisiatif konkret adalah program Media Fellowship bertajuk “Jurnalis Peduli Pesisir, Selamatkan Urip Wong Jateng,” yang mengikutsertakan jurnalis muda dan pers mahasiswa dalam pelatihan serta peliputan langsung isu-isu krisis pesisir di Jawa Tengah, seperti abrasi dan kerusakan ekosistem laut (WALHI Jawa Tengah, 2025). Melalui kemitraan ini, media tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas sosial dan agen perubahan yang memperkuat advokasi serta membuka ruang dialog publik yang konstruktif demi terciptanya keadilan ekologis yang berkelanjutan.

2.3.2.4 Akademisi dan Institusi Pendidikan

Kemitraan dengan kalangan akademisi dan institusi perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memperkuat basis pengetahuan ilmiah dan kritik terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup. Lembaga pendidikan tinggi berperan sebagai ruang strategis untuk penyebaran edukasi lingkungan, pengembangan kurikulum alternatif, serta pembentukan generasi muda yang memiliki kepedulian ekologis. Salah satu contohnya adalah keterlibatan WALHI Jawa Tengah dalam koalisi Maleh Dadi Segoro, sebuah aliansi yang menolak proyek tanggul laut raksasa di Pantura, di mana WALHI bekerja sama dengan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) melalui Sustainable Development Research Center serta Program Magister Lingkungan

dan Perkotaan Universitas Katolik Soegijapranata (WALHI Jawa Tengah, 2024).

Selain itu, WALHI secara aktif memfasilitasi dan mendukung berbagai program pendidikan lingkungan yang menysasar pelajar, mahasiswa, dan akademisi, melalui kegiatan seperti riset bersama (Styawan et al., 2022), pelatihan (Arif, 2023), forum diskusi (Diaz, 2024), hingga kegiatan advokasi berbasis lapangan. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat fondasi ilmiah dalam kerja advokasi, tetapi juga menjadi wahana untuk menumbuhkan kepemimpinan ekologis di kalangan generasi muda.

2.3.2.5 Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara

Pemerintah daerah dan lembaga negara memegang peran krusial sebagai pemangku kebijakan, khususnya dalam menentukan arah pembangunan, perlindungan lingkungan, serta pemberian izin pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, keduanya diposisikan sebagai mitra dalam dialog kebijakan sekaligus sasaran utama dari kerja-kerja advokasi WALHI Jawa Tengah.

Dengan pendekatan yang kritis namun konstruktif, WALHI mendorong lahirnya regulasi serta praktik implementasi kebijakan yang mengedepankan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Kegiatan pemantauan kebijakan, keterlibatan dalam forum-forum konsultatif, serta pelaporan atas dugaan pelanggaran lingkungan merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat sipil dalam memastikan tata kelola lingkungan yang transparan dan berintegritas.

Tabel 2. 1 Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara

Institusi	Peran dan Hubungan dengan WALHI Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Terlibat sebagai mitra strategis dalam advokasi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyusunan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta pemantauan terhadap pemberian izin industri berbasis ekstraksi sumber daya alam.
DLHK Provinsi/Kabupaten	Berperan sebagai pihak pendamping teknis dalam isu pengelolaan lingkungan hidup, serta menjadi rekan diskusi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan penanggulangan pencemaran.
Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Berpartisipasi aktif dalam forum-forum pembangunan daerah guna mendorong pengarusutamaan isu lingkungan hidup dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.
Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Jawa Tengah	Menjadi sasaran utama advokasi dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan, termasuk terlibat dalam penyusunan regulasi tingkat daerah seperti Peraturan Daerah (Perda).
KLHK Wilayah Jawa	Terlibat dalam proses advokasi penyelesaian konflik agraria, penguasaan ruang dan sumber daya alam, serta memperjuangkan pengakuan hak atas tanah bagi komunitas lokal dan masyarakat adat.
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah	Memanfaatkan saluran pengaduan publik sebagai media pengawasan terhadap praktik maladministrasi, khususnya dalam layanan publik yang berkaitan dengan izin dan pengelolaan lingkungan.
Komnas HAM Perwakilan Jawa Tengah	Menjalin kemitraan dalam mendorong agenda keadilan ekologis serta penegakan hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

2.3.2.6 Sektor Swasta dan Koperasi

Hubungan antara WALHI dan sektor swasta memiliki karakter ganda. Di satu sisi, WALHI menjalankan fungsi pengawasan kritis terhadap kegiatan industri yang berdampak negatif terhadap lingkungan, melalui jalur hukum maupun kampanye advokasi di ruang publik. Di sisi lain, WALHI juga mendorong tumbuhnya model ekonomi alternatif yang berbasis pada koperasi rakyat, praktik

pertanian berkelanjutan, serta usaha mikro dan kecil yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Kemitraan dengan pelaku usaha lokal yang menjunjung prinsip keadilan ekologis menjadi bagian dari strategi jangka panjang WALHI dalam mendukung transisi menuju sistem ekonomi hijau yang berkeadilan.

Dalam menjalin interaksi dengan pelaku industri, WALHI menggunakan beragam pendekatan seperti kampanye kesadaran publik, upaya litigasi strategis, serta kolaborasi bersama aktor-aktor yang memiliki kepentingan serupa. Media massa dan teknologi digital turut dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pesan-pesan advokasi lingkungan. Melalui strategi ini, WALHI tidak hanya berupaya membatasi aktivitas industri yang merusak alam, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan sebagai langkah konkret perlindungan lingkungan hidup.

Dalam ranah energi terbarukan, WALHI Jawa Tengah aktif mendorong pendidikan publik mengenai perubahan iklim dan transisi energi bersih, khususnya di kalangan generasi muda. Salah satu inisiatifnya adalah kegiatan *Youth Climate Camp* pada tahun 2018 yang difasilitasi oleh Lembaga Kemitraan serta Kedutaan Besar Denmark di Indonesia (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2018). Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat kesadaran ekologis sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta yang berpihak pada keberlanjutan energi.

2.3.2.7 Donor dan Mitra Pembangunan

Donor serta mitra pembangunan memiliki peranan krusial dalam menjamin keberlangsungan berbagai inisiatif program WALHI, baik melalui kontribusi pendanaan, dukungan teknis, maupun penguatan kapasitas kelembagaan. Bantuan finansial yang diberikan

memungkinkan WALHI untuk melaksanakan kegiatan advokasi, pendidikan publik, riset, serta kampanye lingkungan secara konsisten. Sementara itu, dukungan teknis dari mitra pembangunan turut meningkatkan mutu pelaksanaan program melalui alih pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan yang memperkuat kemampuan organisasi maupun komunitas dampingan.

WALHI Jawa Tengah menjalin kemitraan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan tetap selaras dengan prinsip dasar dan mandat organisasi. Kehadiran mitra pembangunan juga menjadi kanal strategis dalam pertukaran wawasan dan peningkatan efektivitas gerakan lingkungan di tingkat global.

Sebagai contoh, WALHI Jawa Tengah tergabung dalam konsorsium FOCUS yang dipimpin oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS), bersama dengan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University. Program ini didukung oleh Badan Kerja Sama Pembangunan Norwegia (NORAD) untuk mendorong pengelolaan pesisir secara terpadu di wilayah Jawa Tengah (HIVOS, 2022). Dalam konsorsium ini, WALHI berkontribusi dalam mendorong advokasi kebijakan, penguatan kapasitas komunitas pesisir, kampanye bersama, serta pengawasan terhadap proyek pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir.